

## Analisis Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali

Khafida Nur Azizah<sup>1</sup>, Rahayu Subekti<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, surakarta, Indonesia

### Info Artikel

**Keywords:**

Land Registration; Complete Systematic Land Registration; National Land Agency.

**Kata kunci:**

Pendaftaran Tanah; Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; Badan Pertanahan Nasional.

**Corresponding Author:**

Khafida Nur Azizah, E-mail: [khafidaNazizah@gmail.com](mailto:khafidaNazizah@gmail.com)

P-ISSN: XXXX-XXXX

E-ISSN: XXXX-XXXX

### Abstract

*Complete Systematic Land Registration is a land registration activity that is carried out simultaneously for all objects of land registration throughout the territory of the Republic of Indonesia. The author aims to determine the effectiveness of the implementation of land registration through the PTSL program implemented at the Boyolali District BPN Office. The formulation of the problem proposed is: how the implementation of land registration through the PTSL program at the Boyolali District BPN Office, and what supporting and inhibiting factors occurred during the PTSL program implementation. This legal research is empirical research. Data obtained by literature study and research directly from original sources in the form of interviews, which are then processed and analyzed by descriptive methods. The final conclusion of this study is to show that the implementation of land registration through the PTSL program has been running in accordance with the prevailing system structure in Permen NO. 6 of 2018, in the implementation process there are several obstacles and targets that have not been achieved but there is an increase in the achievement of targets every year. From these indicators the authors conclude that the implementation of PTSL has been quite effective.*

### Abstrak

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Penulis bertujuan guna untuk mengetahui tingkat efektifitas pelaksanaan pendaftaran tanah melalui program PTSL yang dilaksanakan di Kantor BPN Kabupaten Boyolali. Rumusan masalah yang diajukan yaitu : bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah melalui program PTSL di Kantor BPN Kabupaten Boyolali, dan faktor pendukung dan penghambat apa sajakah yang terjadi saat pelaksanaan program PTSL. Penelitian hukum ini termasuk penelitian empiris. Data diperoleh dengan cara studi pustaka dan penelitian secara langsung dari sumber asli yang berupa wawancara, yang kemudian diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif. Kesimpulan akhir dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah melalui program PTSL sudah berjalan sesuai dengan stuktur sistem yang berlaku di Permen NO. 6 tahun 2018, namun dalam proses pelaksanaannya terdapat beberapa kendala dan target yang masih belum tercapai akan tetapi ada peningkatan pencapaian target setiap tahunnya. Dari indikator tersebut penulis memberi kesimpulan yaitu pelaksanaan PTSL sudah cukup efektif terlaksana.

## I. Pendahuluan

Sesuai dengan ketentuan undang-undang pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi dasar bagi pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” demikian pula soal tanah, pemerintahan berkewajiban memberikan kepastian hukum terhadap lahan yang dimiliki masyarakat atau badan usaha. Negara Indonesia telah menjamin hak rakyatnya. Untuk memperoleh kepastian hukum dan hak atas tanah Undang-Undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah menugaskan kewajiban kepada pemerintahan untuk mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Sertifikat hak atas tanah adalah suatu bukti yang sangat kuat mengenai hal penguasaan atau pemilikan tanah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintahan secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan pengkajian serta pemeliharaan data fisik dan yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Tujuan pendaftaran tanah itu sendiri terdapat dalam pasal 3 Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997.<sup>2</sup>

Pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam suatu wilayah desa/ kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu,<sup>3</sup> yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.<sup>4</sup> Di Boyolali terdapat 671.081 bidang sertifikat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 636.081 yang sudah sertipikat. Perlu dilakukan pendaftaran tanah untuk tercapainya kepastian hukum dan mengurangi terjadinya penyebab terjadinya sengketa tanah. Kasten Situmorang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali mengatakan bahwa ia optimis mampu memenuhi target penerbitan sertifikat tahun ini 35.000 bidang tanah di seluruh Kabupaten Boyolali. Hal ini dilakukan agar seluruh bidang tanah di Kabupaten Boyolali sudah bersertifikat, selain bidang tanah pekarangan, rumah, dan lahan pertanian, pihaknya juga akan menerbitkan sertifikat sungai, tanah

<sup>1</sup> Lego Karjoko, Zaidah Nur Rosidah, And I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, ‘Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah’, *Bestuur*, 7.1 (2020), 1 <<https://doi.org/10.20961/Bestuur.V7i1.42694>>.

<sup>2</sup> And Others, ‘Natural Resource Management In The Welfare State Paradigm On The Environmental Policy Rules In Indonesia’, *International Journal Of Advanced Research*, 8.1 (2020), 1198–1205 <<https://doi.org/10.21474/Ijar01/10424>>.

<sup>3</sup> I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Henning Glaser, Mohd Rizal Palil, Soediro, And Others, ‘The Regulatory Formulations Of Central Java And East Java Watershed: Strengthening Local Government In Legislative Drafting Practices Towards Green Legislation’, *International Journal Of Business, Economics And Law*, 14.4 (2017), 225–29.

<sup>4</sup> Slamet Muryono, Agung Nugraha Bimasena, And Asih Retno Dewi, ‘Optimalisasi Pemanfaatan Neraca Penatagunaan Tanah Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Daerah Istimewa Yogyakarta’, *Bhumi, Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 4.2 (2018), 224–48.

kas desa asal bukan tanah kawasan hutan.<sup>5</sup> Dari keseluruhan bidang tanah tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali melaksanakan program tersebut melalui Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali telah menerbitkan 25.000 sertifikat bidang tanah masyarakat di daerah Boyolali pada bulan juni 2019. Penyertifikasian tanah berdasarkan data yang ada belum mencapai target 100% dari lima juta bidang tanah yang menjadi target program PTSL Tahun 2017 secara nasional (Kantor Pertanahan Boyolali, 2019).<sup>6</sup> Berdasarkan uraian di atas maka Penulis memutuskan untuk mengambil permasalahan: Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah melalui program PTSL di Kantor BPN Kabupaten Boyolali beserta faktor pendukung dan faktor penghambat dari indikator tersebut dapat dianalisis tingkat efektifitasnya.<sup>7</sup>

## II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian empiris, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, Pendekatan kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang digunakan peneliti dengan berdasarkan data-data yang diperoleh atau ditanyakan oleh responden secara lisan atau tulisan, data dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dalam pengertian tersebut penulis bertujuan untuk memberikan data yang akurat mengenai Tingkat Efektifitas pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Boyolali.<sup>8</sup>

## III. Pembahasan

### 1. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor BPN Kabupaten Boyolali

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah program dari pemerintah pada tahun 2017 yang akan membagikan lima juta sertifikat di seluruh wilayah Indonesia<sup>9</sup>. Menteri Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djajil menyatakan bahwa wilayah NKRI ini baru 46% yang bersertifikat sedangkan yang belum bersertifikat 54% hal ini yang menjadi latarbelakang adanya pemberian sertifikat secara gratis dengan diadakannya program tersebut yang dimulai sejak tahun 2017.<sup>10</sup>

Pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali pada tahun 2017 mendapatkan target sebanyak 671.081 bidang sertifikat, dan terdapat sebanyak 636.081 Perlunya dilakukan pendaftaran tanah untuk tercapainya kepastian hukum dan mengurangi terjadinya

<sup>5</sup> Y. Arizona, 'Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, 8.3 (2011), 257–314.

<sup>6</sup> I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani And Others, 'Politic Of Legislation In Indonesia About Forestry And The Mining Activity Permit In The Forest Area Of Environmental Justice', *Journal Of Engineering And Applied Sciences*, 13.6 (2018), 1430–35 <<https://doi.org/10.3923/Jeasci.2018.1430.1435>>.

<sup>7</sup> Karjoko, Rosidah, And Rahmi Handayani.

<sup>8</sup> Prof Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

<sup>9</sup> Fatma Ulfatun Najicha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, And Hartiwiningsih, 'Legal Protection "Substantive Rights For Environmental Quality" On Environmental Law Against Human Rights In The Constitution In Indonesia', 140.Icleh (2020), 719–24 <<https://doi.org/10.2991/Aebmr.K.200513.136>>.

<sup>10</sup> Salma Suroyya Yuniyanti, 'The Philosophical Foundation Of The Coherence Of Regulations Concerning Apartment In Indonesia', *Journal Of Morality And Legal Culture*, 1.1 (2020), 18 <<https://doi.org/10.20961/Jmail.V1i1.44745>>.

penyebab terjadinya sengketa tanah. Dan yang sudah bersertifikat untuk memenuhi target penerbitan sertifikat tahun ini kurang 35.000 bidang tanah diseluruh Kabupaten Boyolali yang rencananya pada jangka waktu kerja akhir 2017, pelaksanaan program PTSL dapat diselesaikan tepat waktu.<sup>11</sup> Untuk pelaksanaan PTSL sesuai hasil wawancara diambil wilayah kecamatan Teras Boyolali tidak s e m u a desa yang terdaftar untuk mengikuti program PTSL tersebut, hanya beberapa desa saja, meliputi<sup>12</sup>:

Tabel 1.

Daftar Objek PTSL Kecamatan Teras Boyolali

No	Desa yang terdaftar Kecamatan Teras	Target PTSL
1.	Desa Gumukrejo	417
2.	Desa Kadireso	70
3.	Desa Krasak	136
4.	Desa Teras	228
5.	Desa Bangsalan	135
6.	Desa Sudimoro	87
7.	Desa Tawang Sari	150
<b>Jumlah</b>		<b>1223</b>

Sumber: BPN Kab. Boyolali Daftar Kuota Desa Teras

Dalam pelaksanaan penetapan ATR/BPN Kabupaten Boyolali Penetapan lokasi pelaksanaan program PTSL tersebut didasarkan karena masih banyaknya bidang tanah yang belum memiliki sertifikat serta melalui p e r t i m b a n g a n masyarakat yang diwakilkan oleh perangkat desa. Proses pelaksanaan program PTSL antara Kantor ATR/BPN Kabupaten Boyolali dengan instansi lain :<sup>13</sup>

- a. Kantor ATR/BPN Kabupaten Boyolali  
Setelah Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Boyolali menentukan lokasi pelaksanaan program PTSL, pihak kantor membuat surat pemberitahuan yang akan diajukan kepada Pemerintahan Daerah bahwa akan dilaksanakan program pelaksanaan PTSL di beberapa desa yang ada di wilayah Kabupaten Boyolali.
- b. Kantor Pemerintahan Daerah  
Setelah menerima surat pemberitahuan Bupati selaku Kepala Pemerintahan Daerah

<sup>11</sup> Fatma Ulfatun Najicha And Others, 'Regulation Of Law Enforcement In Prevention And Handling Of Fire Forests In Environmental Hazards', *Medico-Legal Update*, 21.1 (2021), 259–62 <https://doi.org/10.37506/Mlu.V21i1.2314>.

<sup>12</sup> M. B. Adi Wicaksono, I.G.A.K. Rachmi Handayani, And Lego Karjoko, 'State Policy's Analysis In The Redistribution Of Reformed Agrarian Lands From Forest Areas In Indonesia (Study Of Presidential Regulation Number 86 Year 2018 Regarding Agrarian Reform)', 358.Icglow (2019), 174–78 <https://doi.org/10.2991/Icglow-19.2019.45>.

<sup>13</sup> Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kebutuhan, Aspek Hukum Pertahanan Dalam Pengelolaan Hutan Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Boyolali memberikan instruksi untuk setiap Kepala Kantor Kecamatan yang telah ditunjuk atau ditentukan Kantor ATR/BPN Kabupaten Boyolali bahwa akan dilaksanakan pelaksanaan program PTSL.

c. Kantor Kecamatan

Setelah Camat selaku Kepala Wilayah Kecamatan menerima instruksi dari Bupati Kabupaten Boyolali tentang penunjukan Kecamatan sebagai lokasi pelaksanaan program PTSL, Camat memberitahukan kepada setiap Kepala Desa yang ditunjuk oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Boyolali sebagai lokasi pelaksanaan program PTSL.

d. Kantor Desa

Setelah Kepala Desa menerima surat pemberitahuan dari Kantor Kecamatan. Kepala Desa menunggu koordinasi lebih lanjut dari ATR/BPN Kabupaten Boyolali. Tahapan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu Perencanaan dan Persiapan, Penetapan Lokasi, Pembentukan dan Penetapan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) dan Satuan Tugas, Penyuluhan, Pengumpulan dan Pengolahan Data Yuridis, Penelitian Data Yuridis Untuk Pembuktian Hak, Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis beserta Pengesahannya, Penegasan Konversi, Pengakuan Hak, dan Pemberian Hak; Pembukuan Hak, Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah, Penyelesaian Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Pendokumentasian dan Penyerahan Hasil Kegiatan, Pelaporan.<sup>14</sup>

## 2. Efektifitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Dalam mengukur capaian keberhasilan Pelaksanaan Program PTSL di Kabupaten Boyolali, maka peneliti ingin melihat bagaimana sumber daya yang mendukung program, pelaksanaan atau proses berjalannya program serta sasaran yang sudah dilaksanakan menyebutkan ada 3 pendekatan utama dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

a. Pendekatan Sumber/*Input*,

Pendekatan ini mengutamakan adanya keberhasilan suatu organisasi dalam memperoleh sumber dengan kebutuhan organisasi. Target sertifikat sebanyak 35.000 bidang tanah yang harus diselesaikan kurang lebih sekitar 6 bulan, dengan waktu dan jumlah yang tidak seimbang BPN kabupaten Boyolali menambah sekitar 18 orang PTT (Pegawai Tidak Tetap) yang baru masuk dan sudah masuk ke dalam Tim Ajudikasi untuk membantu petugas PTSL.

b. Pendekatan Proses,

c. Pendekatan ini mengutamakan pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan tahapan yang ada berjalan secara terkoordinasi.<sup>15</sup> Proses awal yang dilakukan adalah Perencanaan dan persiapan, dilakukan pada internal BPN Kabupaten Boyolali tentunya dalam perencanaan dilakukan rapat yang dihadiri para pejabat di lingkungan BPN Kabupaten Boyolali, persiapan yang dilakukan untuk membentuk dan

<sup>14</sup> Haris Budiman And Others, 'The Application Of Criminal Sanctions On The Distribution Of Alcoholic Drinks', *Journal Of Morality And Legal Culture*, 1.1 (2020), 7 <<https://doi.org/10.20961/jmail.v1i1.44740>>.

<sup>15</sup> I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Henning Glaser, Mohd Rizal Palil, And Fatma Ulfatun Najicha, 'The Regulatory Formulations Of Central Java And East Java Watershed: Strengthening Local Government In Legislative Drafting Practices Towards Green Legislation', 14.4 (2017), 225–29.

penetapan panitia adjudikasi PTSL dan Satuan Tugas atau Satgas yang akan menjadi pelaksana dalam Program PTSL.<sup>16</sup> Setelah itu ada tim yang melakukan peninjauan lokasi untuk pelaksanaan Program PTSL yang nantinya akan diterbitkan SK tersebut berisikan jumlah bidang tanah yang menjadi target dan jumlah bidang tanah di setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan yang ditetapkan.<sup>17</sup> Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali telah melakukan tindakan hukum dengan membentuk keputusan penetapan lokasi PTSL dan dalam pelaksanaannya sudah melakukan perubahan sebanyak empat kali dengan berdasarkan hasil evaluasi pengumpulan data fisik dan data yuridis di masing-masing lokasi tidak terlaksana efektif dimana ada beberapa desa tidak mencapai target dan ada yang melebihi target.<sup>18</sup> Selanjutnya akan dilakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait Program PTSL. Penyuluhan ini selain tujuannya untuk masyarakat mengetahui adanya program, juga untuk masyarakat yang memiliki bidang tanah yang belum bersertifikat agar segera ikut serta dalam Program PTSL dengan ketentuan menyiapkan Pasang Patok Batas Tanah dan mempersiapkan berkas.<sup>19</sup> Selain itu, Permasalahan yang kerap terjadi di lapangan saat pengumpulan data fisik, bahkan beberapa kali petugas harus menjadwalkan ulang untuk pengukuran tanah akibat dari sulitnya mempertemukan dan menghadirkan pemilik tanah dan saksi yang berbatasan dengan tanah.<sup>20</sup> Sebelumnya pengumpulan data fisik dan yuridis mengalami permasalahan di lapangan, hal yang juga kerap terjadi permasalahan saat dilakukan penelitian data yuridis untuk pembuktian hak. Hal ini jika pemilik tanah memiliki keseluruhan syarat maka petugas pelaksana program akan melanjutkan pada tahapan Penegasan konvensi, pengakuan hak dan pemberian hak serta Pembukuan hak agar dapat diterbitkan sertifikat hak atas tanah.<sup>21</sup> Proses terakhir yang akan dilewati masyarakat adalah penyerahan sertifikat hak tanah yang dibagikan langsung kepada para masyarakat yang belum memiliki bidang tanah tapi sudah menyelesaikan keseluruhan persyaratan dan tahapan yang harus dilalui, yang kemudian hasil kegiatan akan dilakukan Pendokumentasian dan Pelaporan Program Pelaksanaan PTSL.<sup>22</sup>

d. Pendekatan Sasaran

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauhmana suatu lembaga berhasil merealisasikan atau mengukur tingkat keberhasilan sasaran yang hendak dicapai. Efektifitas juga memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Laporan akhir pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Boyolali Tahun 2017-2019 menunjukkan bahwa pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Boyolali

<sup>16</sup> Muthia Sakti, 'Legal Protection For Sellers In The Use Of Joint Accounts As One Of The Payments In E-Commerce', *Journal Of Morality And Legal Culture*, 1.1 (2020), 1 <<https://doi.org/10.20961/jmail.v1i1.44737>>.

<sup>17</sup> Fatma Ulfatun Najicha, 'Konstitusionalitas Pengelolaan Migas Dalam Mewujudkan Kedaulatan Energi Indonesia Pena Justisia : Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi . Berdasarkan Data Dari Pertamina Adalah Sebesar 77 , 00 Juta Kl , Sementara Kemampuan Produksi Kilang N', *Pena Justisia : Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 19.2 (2020), 144-55.

<sup>18</sup> Andesgur Ivaini, 'Analisa Kebijakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Pesticida', *Bestuur*, 7.2 (2019).

<sup>19</sup> M M S Wijaksa And F U Najicha, 'Policy Update Of The Criminal Sanction Formulation For Corporations In Corruption Case', *European Journal Of Molecular & Clinical ...*, 07.10 (2021), 1832-39 <[https://ejmcm.com/article\\_6795.html](https://ejmcm.com/article_6795.html)>.

<sup>20</sup> I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani And Others, 'Politik Of Legislation In Indonesia About Forestry And The Mining Activity Permit In The Forest Area Of Environmental Justice', *Journal Of Engineering And Applied Sciences*, 2018, 1430-35 <<https://doi.org/10.3923/jeasci.2018.1430.1435>>.

<sup>21</sup> Ulfa Nur Oktiana, Waluyo, And Asianto Nugroho, 'Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berdasarkan Regulasi Rencana Tata Ruang', *Jurnal Discretie*, 1.1 (2020), 16-24.

<sup>22</sup> Yuniyanti.

masih belum maksimal dengan belum tercapainya target. Meskipun tidak mencapai target dengan baik namun ada peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 2. Laporan PTSL  
TIM IV

No	Desa yang terdaftar Kec. Teras	Target PTSL	2017	2018	2019
1.	Desa Gumukrejo	417	65	167	343
2.	Desa Kadireso	70	-	70	-
3.	Desa Krasak	136	-	65	103
4.	Desa Teras	228	57	98	166
5.	Desa Bangsalan	135	24	73	106
6.	Desa Sudimoro	87	-	38	71
7.	Desa Tawang Sari	150	49	112	138
Jumlah		1223	195	623	927

Sumber : Data Laporan PTSL Tim IV 2019 BPN Boyolali

#### IV. Penutup

Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah melalui program PTSL sudah cukup efektif dengan adanya penambahan PTT (Pegawai Tidak Tetap) dalam menyelesaikan program, dan juga karena adanya alur dan tahapan pelaksanaan program yang sudah berjalan sesuai dengan aturan meskipun dalam prosesnya terdapat beberapa kendala yang membuat terjadinya keterlambatan target yang sudah direncanakan tetapi, setiap tahunnya ada peningkatan dalam pencapaiannya pada setiap tahunnya. Dalam mengukur tercapainya keberhasilan Pelaksanaan Program PTSL di Kabupaten Boyolali, dapat dilihat dari sumber daya yang mendukung program tersebut, pelaksanaan atau proses berjalannya program serta sasaran yang sudah dilaksanakan. Sehingga hal ini sependapat dengan teori yang diungkapkan Martini dan Lubis (1987 : 56) menyebutkan ada 3 pendekatan utama dalam pengukuran efektivitas, yaitu Pendekatan Sumber, Pendekatan Proses, dan Pendekatan Sasaran.<sup>23</sup>

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, saran yang dapat disampaikan adalah diharapkan pihak pelaksanaan program dapat melaksanakan sosialisasi terus menerus kepada masyarakat atau pemohon pemilik tanah dan Untuk pihak pelaksanaan program diharapkan selalu melakukan koordinasi antar lembaga yang terkait seperti pihak ATR/BPN Kabupaten Boyolali, Pihak Pemerintahan Desa, Pihak kecamatan, dan Pihak Desa Kabupaten Boyolali untuk melancarkan proses pelaksanaan program.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Septya Hanung Surya Dewi, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, And Fatma Ulfatun Najicha, 'Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiarni Hutan Adat', 9860 (2016), 21–29.

<sup>24</sup> Waluyo, F. Ulfatun Najicha, And Sapto Hermawan, 'Law In The Globalization And Its Influence On Economic Development And Environmental Preservation Based On Pancasila And The Indonesian Constitution Of 1945',

## References

- Arizona, Y., 'Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, 8.3 (2011), 257–314
- Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kebutanan, Aspek Hukum Pertahanan Dalam Pengelolaan Hutan Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Budiman, Haris, Ela Nurlaela, Diding Rahmat, And Suwari Akhmaddhian, 'The Application Of Criminal Sanctions On The Distribution Of Alcoholic Drinks', *Journal Of Morality And Legal Culture*, 1.1 (2020), 7 <<https://doi.org/10.20961/jmail.v1i1.44740>>
- Dewi, Septya Hanung Surya, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, And Fatma Ulfatun Najicha, 'Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan Adat', 9860 (2016), 21–29
- Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, I., Gunarto Gunarto, Anis Mashdurohatun, I. Gusti Putu Diva Awatara, And Fatma Ulfatun Najicha, 'Politic Of Legislation In Indonesia About Forestry And The Mining Activity Permit In The Forest Area Of Environmental Justice', *Journal Of Engineering And Applied Sciences*, 13.6 (2018), 1430–35 <<https://doi.org/10.3923/jeasci.2018.1430.1435>>
- , 'Politic Of Legislation In Indonesia About Forestry And The Mining Activity Permit In The Forest Area Of Environmental Justice', *Journal Of Engineering And Applied Sciences*, 2018, 1430–35 <<https://doi.org/10.3923/jeasci.2018.1430.1435>>
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, Henning Glaser, Mohd Rizal Palil, And Fatma Ulfatun Najicha, 'The Regulatory Formulations Of Central Java And East Java Watershed: Strengthening Local Government In Legislative Drafting Practices Towards Green Legislation', 14.4 (2017), 225–29
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, Henning Glaser, Mohd Rizal Palil, Soediro, And Fatma Ulfatun Najicha, 'The Regulatory Formulations Of Central Java And East Java Watershed: Strengthening Local Government In Legislative Drafting Practices Towards Green Legislation', *International Journal Of Business, Economics And Law*, 14.4 (2017), 225–29
- Ivnaini, Andesgur, 'Analisa Kebijakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Pestisida', *Bestuur*, 7.2 (2019)
- Karjoko, Lego, Zaidah Nur Rosidah, And I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, 'Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah', *Bestuur*, 7.1 (2020), 1 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.42694>>
- Marzuki, Prof Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Muryono, Slamet, Agung Nugraha Bimasena, And Asih Retno Dewi, 'Optimalisasi Pemanfaatan Neraca Penatagunaan Tanah Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Daerah Istimewa Yogyakarta', *Bhumi, Jurnal Agraria Dan Pertanian*, 4.2 (2018), 224–48
- Najicha, Fatma Ulfatun, 'Konstitusionalitas Pengelolaan Migas Dalam Mewujudkan Kedaulatan Energi Indonesia Pena Justisia : Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi .

---

*Atlantis Press, 3rd International Conference On Globalization Of Law And Local Wisdom (Icglow 2019)*, 358.Icglow (2019), 317–21 <<https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.78>>.



- Berdasarkan Data Dari Pertamina Adalah Sebesar 77 , 00 Juta Kl , Sementara Kemampuan Produksi Kilang N', *Pena Justisia : Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 19.2 (2020), 144–55
- Najicha, Fatma Ulfatun, I Gusti Ayu, Ketut Rachmi, And Lego Karjoko, 'Regulation Of Law Enforcement In Prevention And Handling Of Fire Forests In Environmental Hazards', *Medico-Legal Update*, 21.1 (2021), 259–62 <<https://doi.org/10.37506/Mlu.V21i1.2314>>
- Najicha, Fatma Ulfatun, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, And Hartiwiningsih, 'Legal Protection "Substantive Rights For Environmental Quality" On Environmental Law Against Human Rights In The Constitution In Indonesia', 140.Icleh (2020), 719–24 <<https://doi.org/10.2991/Aebmr.K.200513.136>>
- Oktiana, Ulfa Nur, Waluyo, And Asianto Nugroho, 'Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berdasarkan Regulasi Rencana Tata Ruang', *Jurnal Discretie*, 1.1 (2020), 16–24
- Sakti, Muthia, 'Legal Protection For Sellers In The Use Of Joint Accounts As One Of The Payments In E-Commerce', *Journal Of Morality And Legal Culture*, 1.1 (2020), 1 <<https://doi.org/10.20961/Jmail.V1i1.44737>>
- Fatma Ulfatun Najicha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, And Others, 'Natural Resource Management In The Welfare State Paradigm On The Environmental Policy Rules In Indonesia', *International Journal Of Advanced Research*, 8.1 (2020), 1198–1205 <<https://doi.org/10.21474/Ijar01/10424>>
- Waluyo, F. Ulfatun Najicha, And Supto Hermawan, 'Law In The Globalization And Its Influence On Economic Development And Environmental Preservation Based On Pancasila And The Indonesian Constitution Of 1945', *Atlantis Press, 3rd International Conference On Globalization Of Law And Local Wisdom (Icglow 2019)*, 358.Icglow (2019), 317–21 <<https://doi.org/10.2991/Icglow-19.2019.78>>
- Wicaksono, M. B. Adi, I.G.A.K. Rachmi Handayani, And Lego Karjoko, 'State Policy's Analysis In The Redistribution Of Reformed Agrarian Lands From Forest Areas In Indonesia (Study Of Presidential Regulation Number 86 Year 2018 Regarding Agrarian Reform)', 358.Icglow (2019), 174–78 <<https://doi.org/10.2991/Icglow-19.2019.45>>
- Wijaksa, M M S, And F U Najicha, 'Policy Update Of The Criminal Sanction Formulation For Corporations In Corruption Case', *European Journal Of Molecular & Clinical ...*, 07.10 (2021), 1832–39 <[https://ejmcm.com/article\\_6795.html](https://ejmcm.com/article_6795.html)>
- Yuniyanti, Salma Suroyya, 'The Philosophical Foundation Of The Coherence Of Regulations Concerning Apartment In Indonesia', *Journal Of Morality And Legal Culture*, 1.1 (2020), 18 <<https://doi.org/10.20961/Jmail.V1i1.44745>>